

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta secara teknis belum sesuai, tetapi secara prosedural sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Permayarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yaitu meliputi, *Pertama*, ketika benda diterima, benda tersebut akan dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. *Kedua*, setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian benda sitaan. Tahap ini petugas jaga melakukan kegiatan pemeriksaan, menguji, menilai dan menaksir semua benda yang akan disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta. *Ketiga*, setelah melalui proses administrasi, benda sitaan akan dipelihara dan disimpan di gudang sesuai jenis benda dari hasil penelitian kemudian *Keempat*, dilaksanakan pemutasian yang merupakan pemindahan benda sitaan secara administratif untuk kepentingan proses peradilan sesuai tingkat pemeriksaan. *Kelima*, Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis benda tersebut, baik jenis,

macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya terjamin. *Keenam*, Pada aspek pemeliharaan termasuk didalamnya kegiatan pengamanan dan penyelamatan benda sitaan dan rampasan negara. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah dan menangkal gangguan dan ancaman terhadap keutuhan benda sitaan dan rampasan negara baik dari luar maupun dari dalam RUPBASAN. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan benda sitaan dan rampasan negara dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. *Ketujuh*, pengeluaran dan penghapusan. Tahap ini merupakan rangkaian kegiatan pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara yang dilakukan baik sebelum adanya putusan pengadilan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara khususnya di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta meliputi hambatan secara internal dan eksternal.
  - a. Adapun hambatan secara internal diantaranya adalah sebagai berikut :
    - 1) Sumber daya manusia (SDM) RUPBASAN Kelas I Yogyakarta yang masih terbatas.
    - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana terkait gedung serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi RUPBASAN.
  - b. Sedangkan hambatan secara eksternal antara lain :

- 1) Banyak benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta justru merupakan benda temuan (tidak ada proses hukum).
  - 2) Masih banyak benda sitaan dan rampasan negara yang sudah memperoleh keputusan hukum tetap tidak segera di eksekusi.
3. Upaya mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- a. Upaya dalam mengatasi hambatan secara internal adalah :
    - 1) Dalam mengatasi sumber daya manusia yang masih terbatas yaitu RUPBASAN Kelas I Yogyakarta bekerjasama dengan pihak luar (ahli dalam bidangnya).
    - 2) Upaya dalam mengatasi persoalan luas gedung yang belum memadai, RUPBASAN Kelas I Yogyakarta memanfaatkan gudang berbahaya dan gudang berharga untuk menyimpan benda sitaan yang lain.
    - 3) Persoalan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan pemeliharaan oleh RUPBASAN Kelas I Yogyakarta di uapayakan untuk anggaran yang ada digunakan dengan sehemat mungkin.
  - b. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan secara eksternal antara lain :
    - 1) Banyak benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta justru merupakan benda temuan. Upaya yang

dilakukan oleh RUPBASAN adalah dengan mengadakan koordinasi dengan pihak penitip untuk menanyakan perihal nasib benda sitaan yang dititipkan tersebut dan berupaya mengembalikan benda sitaan tersebut kepada pihak penitip.

- 2) Persoalan benda sitaan dan rampasan negara yang sudah memperoleh keputusan hukum tetap tidak segera di eksekusi. Upaya yang dilakukan oleh RUPBASAN ialah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar benda sitaan tersebut segera di eksekusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka kiranya perlu saran-saran sebagai berikut :

1. Petugas peneliti dan penilai perlu untuk terus mengikuti diklat atau seminar yang berkaitan dengan penelitian tentang keaslian suatu benda, misalnya emas, handphone dll. Kemudian juga perlu penambahan petugas pemeliharaan menjadi 4 (empat) agar lebih maksimal dalam pelaksanaan pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.
2. Melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan memadai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, agar fungsi RUPBASAN dapat berjalan secara maksimal.

3. Perlu mengajukan proposal kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM tentang penambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan agar pemeliharaan benda sitaan berjalan dengan baik dan benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tetap dalam keadaan seperti semula ketika benda sitaan tersebut masuk.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia.

Bima Priya Santosa, 2010. *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*. Jakarta : Paramadina Public Policy Institute.

Burhan Bugin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.

Hadari Nawawi, dan Martini. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press.

Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press

Hartono, 2010. *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana (Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun M. Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Hendrastanto Yudowidagdo. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara.

Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Raja Grafindo Persada.

Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Nikolas Simanjutak, 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nurul Zuriah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ratna Nurul Afiah, 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabert.
- Sukandarrumidi, 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.: UGM Press.
- Sutrisno Hadi, 1997. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- S.Nasution, 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kulitatif*. Bandung: Tarsito.
- WJS Poerwadarminta, 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang  
Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah  
Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002  
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan  
Negara dan Barang Rampasan Negara

